

## ABSTRAK

### **Anggit Septriadi, 1218010018, (2025) Implementasi Kebijakan Penggunaan Sabuk Keselamatan Pada Sopir Angkutan Kota (Angkot) di Kota Bandung**

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung, khususnya pelanggaran terkait tidak digunakannya sabuk keselamatan oleh sopir angkutan kota (angkot), menjadi persoalan serius dalam keselamatan berlalu lintas. Meskipun regulasi telah mewajibkan penggunaan sabuk keselamatan melalui Undang-undang no. 22 Tahun 2009, namun realitas dilapangan menunjukkan masih banyak sopir yang tidak mematuhi. Hal ini diperparah dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum, khususnya di wilayah Kota Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penggunaan sabuk keselamatan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung dan aparat penegak hukum, serta bagaimana interpretasi sopir angkot terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini juga mengkaji proses penerapan kebijakan tersebut dalam keseharian operasional sopir angkot.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik dari Charles O. Jones dalam (Agustino, 2020) yang terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu: 1. Organisasi, 2. Interpretasi, 3. Penerapan. Ketiga dimensi ini digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan dilapangan dengan fokus pada peran kelembangaan, pemahaman pelaku serta proses operasional kebijakan.

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode ini digunakan karena sesuai atau relevan untuk dapat memahami studi implementasi kebijakan penggunaan sabuk keselamatan, dengan fokus kepada bagaimana proses penerapan tersebut berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan sabuk keselamatan pada sopir angkot di Kota Bandung belum berjalan secara efektif. Pada aspek pengorganisasian Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam implementasi kebijakan penggunaan sabuk keselamatan pada sopir angkot belum efektif, karena keterbatasan SDM sehingga diperlukannya personil tambahan. Hasil interpretasi sopir angkot terhadap kebijakan belum efektif, karena pemahaman sopir masih rendah dan penjelasan kebijakan belum operasional. Hasil penerapan kebijakan penggunaan sabuk keselamatan oleh aparat penegak hukum dilapangan dinyatakan belum efektif, karena pelaksanaan belum rutin, dan belum menyasar perilaku sopir secara khusus.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Sabuk Keselamatan